

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)." Vol.5 No.3. 2013.
- Anggi, Intiyas dan Ika. "Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana." t.th.
- Anggraini, Raja Rika. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderating." *JOM Fekon 4 No.1*. 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipata. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Jumanatul Ali. 2004.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat. 2015.
- Friyani Rita. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi)." *Jurnal Sains Sosiohumaniora 1 No.2*. 2017.
- Handayani, Yuli. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung)." *Skripsi Sarjana; Ekonomi: Bandung*. 2015.
- Hari, Ravika Permata. "Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Wilayah Sumatera," *Jurnal Akuntansi 12 No.2*. 2018.
- Haryanto, Sahnuddin, dan Arifuddin. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007.

- Ichlas, Muhammad, Hasan Basri, dan Muhammad Arfan. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.” *Jurnal Magister Akuntansi 3 No.4*. 2014
- L.J, Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Kemenkeu Learning Center. *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat: Perbedaan Basis Kas dan Basis AkruaI. Situs Resmi Kemenkeu Learning Center*. <https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-sistem-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan-pemerintah-pusat-perbedaan-basis-kas-dan-basis-akruaI/> (diakses pada tanggal 20 Desember). 2020.
- Kusumah, Arif Ardi. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya).” 2010.
- Lily. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jom FEKON 2, No.2*. 2015.
- Mahlel, Ridwan dan Nasirwan. “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil.” *J-EBIS 2 No.2*. 2016.
- Maulina, Rina dan Lisa Fatmi. “Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Akbis 2 No.1*. 2018.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Muizz, Achmad Rafiuddi. “Analisis Hubungan Tingkat Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.” *Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis: Semarang*. 2016.
- Mujiaty, Yulia dan Lativa. *Modul Akuntansi Sektor Publik*. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/240267/Cover-akuntansi-sektor-publik-dan-modul.pdf> (diakses pada tanggal 20 Desember). 2020.
- Presiden Republik Indonesia. *Penjelasan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010*.
- Rakhmat. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2018.

- Ramdani, Eldis dan Neo Agustina. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 5 No.1. 2019.
- Salle, Agustinus. “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. t.th.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Cet. 22 Bandung: ALFABETA. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Cet. 22 Bandung: ALFABETA. 2017.
- Susilowati, Lantip. “Tanggungjawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah,” *An-nisbah*, 3 No. 2, 2017.
- Wirawan. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2019.
- Y, Margaretha Hendriani. “Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.” *Skripsi Sarjana; Akuntansi: Yogyakarta*. 2011.
- Zeyn, Elvira. “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan.” *Trikomonika* 10 No.1. 2011.
- “Akuntabilitas.” Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban> ( diakses pada tanggal 28 Desember). 2020
- “Penelitian Deskriptif.” Wikipedia Ensiklopedia Bebas. [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif) (diakses pada tanggal 28 Desember). 2020
- “Penelitian Kualitatif.” Wikipedia Ensiklopedia bebas. [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) (28 Desember 2020).
- “Standar Akuntansi Pemerintahan.” Ensiklopedia Kementerian Keuangan, <https://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/> (diakses pada tanggal 28 Desember 2020)

“Wawancara”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> ( diakses pada tanggal 28 Desember 2020).

“Data Sekunder,” WikiPedia Ensiklopedia Bebas,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan\\_Data\\_Dalam\\_Penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian) (diakses pada tanggal 28 Desember 2020).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA: NURFADILAH SINDIKA SARI  
NIM : 17.2800.052  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
JUDUL : AKUNTABILITAS STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN PAREPARE BERDASARKAN  
PRINSIP SYARIAH

**INSTRUMEN PENELITIAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan:
1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di BKD sudah berjalan dengan baik ?
  2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP di pemerintahan ?
  3. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan SAP sesuai dengan semestinya ?

4. Apakah pelaksanaan SAP dan prosedurnya dapat dimengerti oleh pegawai ?
5. Apakah sarana yang digunakan dalam melaksanakan SAP dan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah memadai?

b. Transparansi

1. Informatif

- a) Apakah BKD menyediakan informasi keuangan lengkap untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut?
- b) Apakah BKD menggunakan website untuk melakukan transparansi kepada masyarakat?
- c) Apakah laporan bisa didapatkan setiap waktu
- d) Apa faktor-faktor yang menghambat proses transparansi dilakukan ?

2. Pengungkapan

- a) Apakah alokasi-alokasi terhadap anggaran mudah didapatkan oleh publik ?
- b) Bagaimana BKD dalam melaksanakan pengelolaan laporan keuangan?
- c) Bagaimana kondisi keuangan badan keuangan daerah ?

3. Keterbukaan

- a) Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam penyusunan anggaran dalam pelayanan masyarakat ?
- b) Apakah anggaran dalam pelayanan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

- c) Bagaimana cara pengawasan dan monitoring dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ?
- d) Apakah laporan pertanggungjawaban tahunan selalu disediakan tepat waktu?

c. Standar Kinerja

1. Informasi keuangan

- a) Apakah besaran sumber dana yang didapatkan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja ?
- b) Apakah anggaran digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam membiayai program atau kegiatan ?
- c) Apakah anggaran yang dianggarkan sudah sesuai dengan target program yang telah ditetapkan?
- d) Apakah kosongnya kas pemerintah pada akhir periode akuntansi menunjukkan keberhasilan kinerja?

2. Informasi non keuangan

- a) Pelayanan-pelayanan apa saja yang diberikan oleh BKD kepada masyarakat?
- b) Apakah prosedur yang diterapkan memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan?
- c) Apa yang dilakukan jika masyarakat yang mengalami kendala dalam prosedur pelayanan ?
- d) Apakah pemberian tugas setiap unit terkait sudah sesuai dengan job description masing-masing ?

d. Prinsip syariah

1. Prinsip Pertanggungjawaban

- a) Apakah laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah, masyarakat dan pemerintah?
- b) Apakah pemerintah menjalankan amanah rakyat dalam pengelolaan keuangan ?
- c) Bagaimana pemerintah terus menjaga prinsip pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya ?

a. Prinsip Kebenaran

- a) Apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ?
- b) Apakah penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan jujur?
- c) Bagaimana BKD dalam menerapkan kebenaran terhadap akuntabilitas, transparansi dan kinerja?

b. Prinsip Keadilan

- a) Apakah laporan keuangan dipublikasi untuk semua orang?
- b) Apakah informasi keuangan dapat diakses oleh semua orang dengan mudah?
- c) Bagaimana BKD dalam menerapkan keadilan terhadap akuntabilitas, transparansi dan kinerja?

Parepare, 18 Mei 2021

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

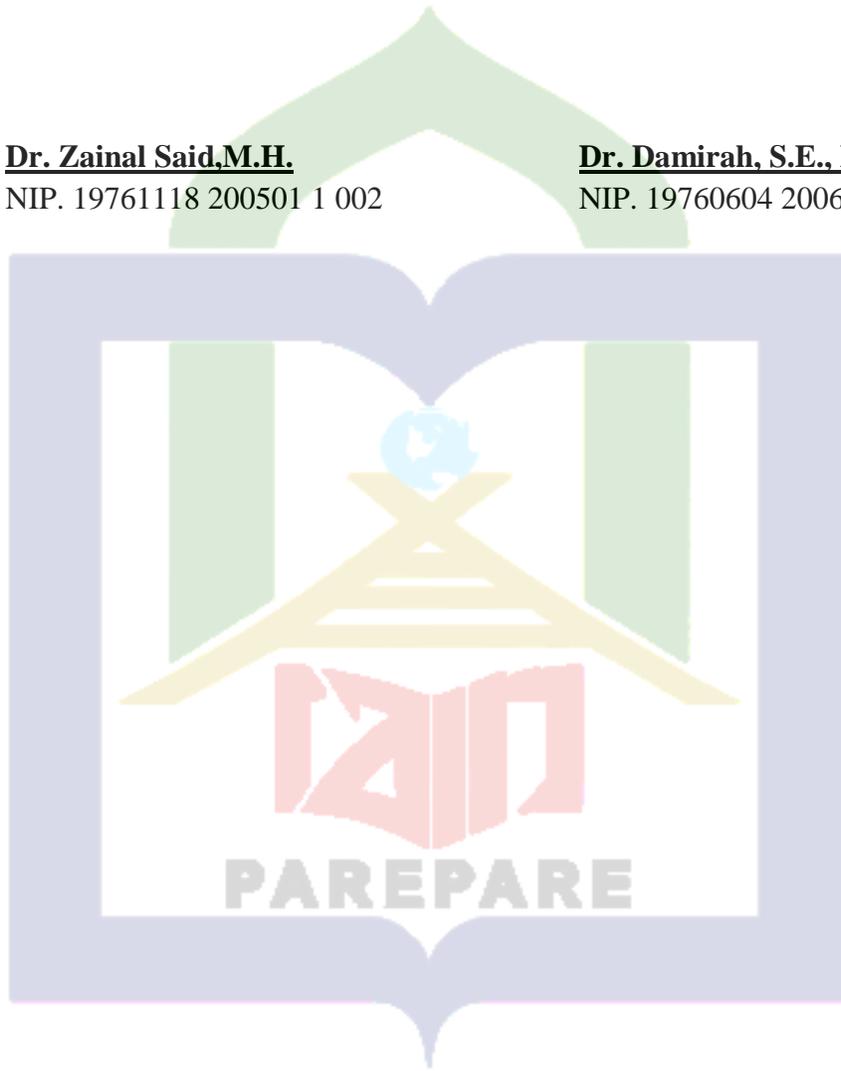
Pembimbing Utama

**Dr. Zainal Said, M.H.**

NIP. 19761118 200501 1 002

**Dr. Damirah, S.E., M.M.**

NIP. 19760604 200604 2 001



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHDY  
Umur : 43 THN.  
Jabatan : Kasubid. Analisa & Evaluasi  
BKD.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah Sindika Sari yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Syariah"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan

  
MUCHDY

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA KARYANA**  
Umur : **32 TAHUN**  
Jabatan : **KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurfadilah Sindika Sari** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Syariah"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, **23** Juni 2021

Yang bersangkutan



**INDRA KARYANA**

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

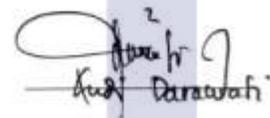
Nama : Andi Darawati  
Umur : 46 Thn  
Jabatan : Kasubag. Evaluasi & Pelaporan BKD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah Sindika Sari yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Syariah"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan

  
Andi Darawati

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

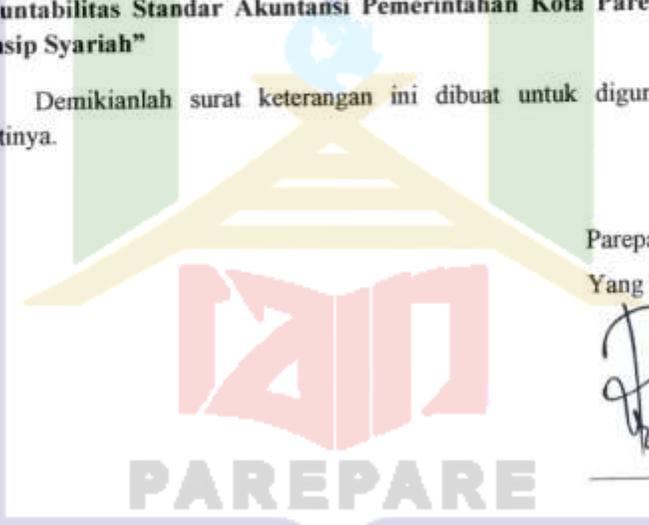
Nama : RAHMAT MUIN  
Umur : 49 tahun.  
Jabatan : KASUBID. PENDATAAN & PENDAFTARAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah Sindika Sari yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Syariah"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2021

Yang bersangkutan



PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agussalim  
Umur : 49. Tahun  
Jabatan : Sde. Badan Keuangan Daerah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadilah Sindika Sari yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Syariah"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2021  
Yang bersangkutan

  
AGUSSALIM

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMKA  
Umur : 43  
Jabatan : Staf BKD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurfadilah Sindika Sari** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Syariah"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juni 2021

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

## HASIL WAWANCARA

### a. Standar Akuntansi Pemerintahan:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di BKD sudah berjalan dengan baik ?

Bapak Muchdy menjelaskan Kami dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Alhamdulillah penerapan SAP sudah berjalan dengan baik.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP di pemerintahan ?

Bapak Muchdy menjelaskan, Kendala yang kami hadapi dalam penerapan SAP, paling kalau ada rolling SDM. Karena biasanya ada orang sudah menguasai satu bidang terus dirolling ke tempat yang baru dan ada orang baru yang mengganti, tentunya harus belajar dan bersosialisasi lagi

3. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan SAP sesuai dengan semestinya ?

Bapak Muchdy menjelaskan, setiap ada perubahan aturan berarti ada perubahan atau penambahan nomenklatur, jadi setiap terjadi perubahan kami akan mengadakan sosialisasi kepada operator dan pengelola akuntansi di setiap SKPD.

4. Apakah pelaksanaan SAP dan prosedurnya dapat dimengerti oleh pegawai ?

Bapak Muchdy menjelaskan, khusus untuk bidang akuntansi dan pelaporan itu 95% SDMnya memiliki *basic* di bidang akuntansi, manajemen, atau ekonomi. Dengan adanya *basic* itu lebih memudahkan mereka dalam memahami penerapan akuntansi khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Apakah sarana yang digunakan dalam melaksanakan SAP dan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah memadai?

Bapak Agussalim menjelaskan, Sarana dalam penerapan SAP alhamdulillah sudah memadai, jadi dalam penerapan SAP itu kami memakai sebuah aplikasi, jadi kami dalam melakukan rekonsiliasi itu melihat diaplikasi itu. Untuk tahun 2021 sudah ada aplikasi baru tapi namun belum optimal jadi kita pake aplikasi sebelumnya sesuai dengan edaran menteri dalam negeri.

b. Transparansi

1. Informatif

a) Apakah BKD menyediakan informasi keuangan lengkap untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut?

Bapak Muchdy menjelaskan dalam hal transparansi pastinya diwajibkan untuk seluruh pemerintah daerah maupun kota untuk mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat, kami menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan lainnya.

b) Apakah BKD menggunakan website untuk melakukan transparansi kepada masyarakat?

Bapak Hamka menjelaskan, Sebenarnya dalam publikasi laporan keuangan, kami hanya publikasikan hard filenya saja kepada media cetak maupun media elektronik kemudian mereka yang menarasikan berapa pendapatan kota Parepare, berapa besar belanja yang dilakukan kota Parepare. Karena soft file dalam pencatatan kami menggunakan sistem dan hanya bisa diakses oleh orang yang memang punya akses terhadap sistem tersebut.

Bapak Muchdy menjelaskan, Ada kami publikasikan laporan keuangan biasanya di ParePos biasanya akhir tahun setelah laporan pertanggungjawaban itu sudah menjadi PERDA tetapi kalau masih mentah belum dipublikasikan. Selain itu, kami juga mempublikasikan di website kominfo, ada khusus untuk BKD disitu informasi-informasi keuangan.

c) Apakah laporan bisa didapatkan setiap waktu?

Bapak Muchdy menjawab, Kami mempublikasikan di media elektronik juga jadi saya rasa bisa diakses setiap waktu selama yang membutuhkan informasi bisa mengakses internet.

d) Apa faktor-faktor yang menghambat proses transparansi dilakukan ?

Bapak Muchdy menjawab, untuk transparansi laporan keuangan itu kami menunggu laporan keuangan itu di audit oleh BPK dan keluarnya Perda baru setelahnya kami publikasikan sehingga mungkin ini yang menyebabkan sedikit lambatnya dalam publikasi laporan keuangan.

## 2. Pengungkapan

a) Apakah alokasi-alokasi terhadap anggaran mudah didapatkan oleh publik ?

Bapak Muchdy menjawab masalah pengungkapan saya rasa kami sudah menjalankan dengan baik, kami sudah ungkapkan seluruh kinerja finansial dalam laporan pertanggungjawaban, seperti alokasi-alokasi anggaran, realisasi dan sisa pagu berapa persentasenya.

b) Bagaimana BKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan?

Bapak Agussalim menjelaskan Pengelolaan keuangan yang kami lakukan di Badan Keuangan Daerah kota Parepare dimulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, pengelolaan pertanggungjawaban, yang kemudiann akan dicatat di bagian akuntansi untuk pencatatan keseluruhan biayanya. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan pengelolaan pendapatan, untuk belanja pemerintah seperti penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan pembiayaan pemerintah. Dalam pelaporan seluruh transaksi yang dilakukan pada pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan akan dicatat oleh bagian akuntansi mulai dari pencatatan jurnal hingga tersusunnya laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang berdasarkan semua regulasi pencatatan dengan menggunakan aplikasi. Kami juga mengakumulasi semua SKPD, kami melakukan pencatatan setiap hari sesuai dengan bukti-bukti dan faktual yang ada.

Pengelolaan perencanaan keuangan, Ibu Indra Karyana menjelaskan penganggaran disusun berdasarkan program yang dimuat dalam rencana kerja

pembangunan daerah disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Rencana-rencana kerja yang akan dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dalam KUA PPAS ini akan diseleksi program-program yang dianggap penting dan mendesak, program yang bukan menjadi prioritas akan dihapuskan. Setelahnya anggaran akan dirincikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, selanjutnya rincian tersebut akan dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Anggaran yang telah disetujui akan dimasukkan ke Raperda APBD yang akan dievaluasi oleh gubernur sebelum disahkan menjadi APBD.

Pengelolaan keuangan pada tahap pelaporan Bapak Muchdy menjelaskan laporan pertanggungjawaban akan kami berikan dan publikasikan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, jadi laporan keuangan yang telah diaudit itu akan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengelolaan laporan keuangan kami menggunakan sistem dalam hal pencatatan kami menggunakan basis akrual, dan khusus untuk laporan realisasi anggaran kami masih menggunakan basis kas. Namun, untuk laporan keuangan secara utuh kami tetap menggunakan basis akrual.

Pengelolaan keuangan pada pelayanan, Bapak Rahmat Muin menjelaskan kami Badan Keuangan Daerah itu selaku koordinator pendapatan asli daerah, kami mengelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kami. Untuk pajak kami mengelola semuanya secara langsung sedangkan retribusi sebagian dikelola oleh SKPD lain seperti retribusi kebersihan dikelola oleh dinas lingkungan hidup, retribusi rumah dinas di kelola masing-masing SKPD seperti rumah dinas guru dikelola oleh dinas pendidikan, sesuai dengan pencatatan aset diunit kerjanya masing-masing.

c) Bagaimana kondisi keuangan badan keuangan daerah ?

Bapak Agussalim menjawab Kondisi keuangan untuk saat ini masih sehat, likuiditasnya masih bagus dalam artian kami masih bisa membayar biaya operasional termasuk utang-utang, kami juga masih surplus dan masih bisa membiayai semua kegiatan di anggaran APBD yang telah ditetapkan.

Bapak Muchdy menjawab Alhamdulillah kondisi keuangan kita saat ini masih normal dan bisa dikatakan sehat, bisa dilihat di laporan realisasi anggaran juga.

d) Bagaimana pencapaian keuangan yang didapatkan oleh BKD selama 3 tahun terakhir?

Bapak Agussalim menjelaskan Pencapaian keuangan secara faktual dilihat dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK bisa dilihat di laporan realisasi anggaran, bisa juga dengan pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban berarti dalam hal ini kita berbicara mengenai opini dari BPK. Jadi opini yang dikeluarkan oleh BPK disesuaikan dengan penyajian laporan yang berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Apakah penerapan SAPnya sudah sesuai atau belum, itulah yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini. Laporan keuangan ini sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan 2018 itu opininya WDP karena ada ketekoran kas, itu yang menyebabkan Parepare mendapatkan opini WDP.

Bapak Muchdy menjelaskan Pencapaian laporan keuangan kita dapat dilihat dari opini BPK, jadi dalam mengaudit dan memeriksa laporan keuangan BPK akan mengeluarkan opini seperti Disclaimer, WDP dan WTP.

Bapak Hamka menjelaskan mengenai laporan realisasi anggaran dan opini BPK sebagai berikut; Sebenarnya BPK dalam mengaudit juga melihat kesesuaian dan kewajaran angka yang tertulis dilaporan keuangan dengan kenyataan yang ada dilapangan, apakah benar jumlah yang ditulis sudah sesuai atau tidak. Setiap pos-pos di laporan realisasi anggaran itu dikatakan optimal kalau sudah mencapai 100%, jadi pada pendapatan semakin besar realisasi daripada yang di anggarkan akan semakin bagus. Sebagai contoh PAD yang berasal dari hasil jasa yang kami berikan misalkan pendapatan pajak daerah tahun 2019 yg terealisasi sebesar 106% artinya pendapatan yang diperoleh lebih banyak daripada yang dianggarkan tentunya ini sangat baik. Sama seperti pendapatan, belanja-belanja pemerintah dikatakan optimal jika mencapai 100% tapi tidak boleh melewati 100% karena nantinya akan menjadi utang. Tidak boleh juga terlalu rendah persentasenya karena artinya ada proyek-proyek yang dianggarkan tetapi tidak berjalan.

### 3. Keterbukaan

a) Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam penyusunan anggaran dalam pelayanan masyarakat ?

Ibu Indra Karyana menjawab, Cara masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran itu ada yang namanya musyawara perencanaan pembangunan (musrenbang) melalui kelurahan. Jadi masyarakat diundang untuk menyampaikan aspirasinya apa yang mereka butuhkan, kemudian hasil musrenbang itu akan diverifikasi lagi mana yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah akan dimuat dalam RKPD yang selanjutnya akan dianggarkan. Selain itu juga biasa diadakan reses melalui anggota DPRD.

b) Apakah anggaran dalam pelayanan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

Ibu Indra Karyana menjawab kalau berbicara mengenai kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat itu, kita analogikan saja dengan janji politik. Janji politik itu kan semuanya keinginan masyarakat jadi selama janji politik itu diterapkan dan realisasikan oleh pemerintah daerah artinya sudah disesuaikan dengan kebutuhannya masyarakat. Sebagai contoh pelayanan kesehatan bisa dilihat semua masyarakat kecil sudah hampir merasakan pelayanan kesehatan, ada call center juga itu semuanya termuat dalam penganggaran.

c) Bagaimana cara pengawasan dan monitoring dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ?

Bapak Agussalim menjawab Pengawasan dan monitoringnya dilaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dari 33 SKPD, rekonsiliasi itu mencocokkan semua angka-angka baik dalam pendapatannya maupun belanja setiap bulan. Kalau ada selisih akan dikoreksi dan diperbaiki.

## c. Standar Kinerja

### 1. Informasi keuangan

a) Apakah besaran sumber dana yang didapatkan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja ?

Ibu Andi Darawati menjawab untuk menilai keberhasilan kinerja kita lihat fisik dan keuangan dari sebuah program. Disini harus lebih besar fisik daripada keuangan karena ini memandakan lebih banyak kerja dibandingkan keluarnya uang, kalau kondisinya seperti ini bisa dikatakan sudah berhasil dalam kinerjanya. Kalau keuangan lebih besar dibandingkan fisik berarti lebih

banyak uang yang dikeluarkan daripada kerja yang dilakukan, tentunya ini menjadi kegagalan dalam kinerja. Sebagai contoh tahun 2020 total persentase fisik program yang kami capai itu 98,71% sedangkan persentase keuangannya 89.08% ini berarti dalam pada tahun 2020 kami sudah bagus dalam hal kinerja.

b) Apakah anggaran digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis dalam membiayai program atau kegiatan ?

Ibu Indra Karyana menjawab dalam mengukur keberhasilan kinerja efektif, efisien dan ekonomis dalam pengelolaannya bisa dilihat pada program dan kegiatan yang sudah disusun, didalamnya ada indikator-indikator yang harus dilakukan. Hal ini dibuat dalam rencana kerja yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja.

c) Apakah anggaran yang dianggarkan sudah sesuai dengan target program yang telah ditetapkan?

Ibu Indra Karyana menjawab, Ini bisa dilihat jika yang termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan target renja maka sudah dikatakan berhasil.

d) Apakah kosongnya kas pemerintah pada akhir periode akuntansi menunjukkan keberhasilan kinerja?

Bapak Agussalim menjawab kalau kekosongan kas sebenarnya bagus juga berarti antara anggaran dan realiasinya itu optimal. Namun kalau kas mengalami kekosongan berarti ada yang tidak normal karena ini akan menjadi fatal. Oleh karena itu setiap tahun pasti ada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Tidak mungkin dalam penganggaran habis untuk dibelanjakan mungkin ada kegiatan yang tidak selesai sehingga dananya di saving untuk dibelanjakan tahun berikutnya pada kegiatan yang sama. Contohnya pengguna SILPA ini utang saat ada kontrak jadi tapi belum dibayarkan maka akan dibayarkan menggunakan SILPA untung tahun depan.

## 2. Informasi non keuangan

a) Pelayanan-pelayanan apa saja yang diberikan oleh BKD kepada masyarakat?

Bapak Rahmat Muin menjawab pelayanan yang kami siapkan di Badan Keuangan Daerah sebagai contoh pajak bumi dan bangunan pastinya pelayanan pembayaran, kalau sifatnya administratif biasanya ada pelayanan mutasi bisa berupa balik nama, pemecahan, mutasi balik nama subjek pajak satu menjadi orang lain. Ada juga yang namanya pelayanan pembetulan terhadap data yang tidak sesuai di SPPT, pendaftaran objek pajak baru, penyediaan salinan SPPT, ada layanan keberatan oleh wajib pajak terhadap kekeliruan atau kesalahan hitung, ada pengurangan pajak dan semua perpajakan.

b) Apakah prosedur yang diterapkan memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan?

Bapak Rahmat Muin menjawab kami dalam membangun kerangka-kerangka SOP itu pastinya pertimbangannya pro rakyat dan memberikan kemudahan esensinya kami memberikan pelayanan seefektif mungkin dalam arti jangan karena satu prosedur memberatkan masyarakat. Namun, tidak mengabaikan juga unsur tertib administrasi artinya persyaratan administrasi itu mutlak karena ini menjadi pedoman bahwa kita menggunakan standar yang sama bagi semua masyarakat, kalau tidak ada persyaratan administrasi bisa saja ada pihak yang bersifat subjektif dalam memberikan pelayanan seperti karena kenal jadi dimudahkan dalam kepengurusannya.

c) Apa yang dilakukan jika masyarakat yang mengalami kendala dalam prosedur pelayanan ?

Bapak Rahmat Muin menjawab jika ada kendala yang dihadapi masyarakat kami akan arahkan apa yang harus mereka lakukan. Dalam formulir pelayanan yang kamu sediakan juga sudah ada daftar dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh masyarakat jadi saya rasa hal tersebut bisa diatasi.

d) Apakah pemberian tugas setiap unit terkait sudah sesuai dengan job description masing-masing ?

Bapak Rahmat Muin menjawab jadi kami disini pastinya untuk pejabat non eselon memang ada dasar-dasar penempatannya berdasarkan keputusan walikota tapi pastinya dalam SK kami sebagai PNS ada namanya tugas lainnya yang berikan pimpinan jadi bisa saja diberikan tugas di tempat lain. Namun, kami juga punya kebijakan-kebijakan dengan kita melakukan rotasi. Rotasi itu penguatannya ada semacam penetapan kepala badan dalam bentuk surat tugas. Hal ini kami lakukan untuk menghindari komunikasi-komunikasi yang mencurigakan misalnya satu pengelola pajak berada di posisi yang sama terlalu lama sehingga terlalu akrab dengan beberapa orang masyarakat sehingga terjadi sikap subjektif dalam pemberian pelayanan. Inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam memberikan pelayanan.

d. Prinsip syariah

1. Prinsip Pertanggungjawaban

a) Apakah laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah, masyarakat dan pemerintah?

Bapak Muchdy menjawab semua dibawah sumpah, jadi saya pikir kami sudah mempertanggungjawabkan hal itu. Dalam melaksanakan akuntabilitas juga kita didasarkan pada *habluminallah wa hablumminannas*. Kami menjaga pertanggungjawaban itu dengan taat asas, taat aturan, taat administrasi. Karena dengan taat dengan hal itu kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan ke masyarakat dan pemerintah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Dan akan kita pertanggungjawabkan juga di akhirat nanti.

b) Apakah pemerintah menjalankan amanah rakyat dalam pengelolaan keuangan ?

Bapak Muchdy menjawab saya pikir iya karena rakyat itu diwakili oleh DPR, APBD disahkan oleh DPR, pertanggungjawaban diterima oleh DPR jadi saya pikir hal tersebut merupakan amanah rakyat. Pertanggungjawaban ini di evaluasi dan dirapatkan juga di DPR, apakah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam penyusunan anggaran, peruntukannya sudah sesuai atau tidak, apakah benar-benar dilaksanakan. Disitulah DPR bisa menolak atau menerima. Jika DPR menolak berarti dalam realisasinya ada yang tidak disetujui misalnya ada penyimpangan didalamnya. Tapi Alhamdulillah

kerjasama antara pemerintah dan DPR sudah bagus artinya kita bisa mengakomodir hampir semua kebutuhan masyarakat kota parepare berdasarkan musrenbag.

c) Bagaimana pemerintah terus menjaga prinsip pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya ?

Bapak Muchdy menjawab kami tetap taat asas, taat aturan, taat administrasi dan peraturan yang berlaku.

## 2. Prinsip Kebenaran

a) Apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ?

Bapak Muchdy menjawab Mutlak mengatakan kalau pencatatan akuntansi harus sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Akuntansi itu tidak boleh diakal-akali karena nantinya laporan yang kita hasilkan juga akan diperiksa oleh BPK dengan melihat kewajaran yang ada di dalamnya. Jadi kami jujur, transparan juga, sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Bagaimana BKD dalam menerapkan kebenaran terhadap akuntabilitas, transparansi dan kinerja?

Bapak Muchdy menjawab kami melakukan pengujian secara periodik dalam artian realisasi dengan posisi kasnya, dengan kas yang ada dibendahara dan kas yang ada di bank sesuai tidak, apakah yang dibelanjakan juga sama atau tidak dengan pertanggungjawabannya, sesuai dengan anggaran atau tidak, terus melakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk melihat kebenaran dalam jumlah yang tertera pada setiap transaksi yang dilakukan.

## 3. Prinsip Keadilan

a) Apakah laporan keuangan dipublikasi untuk semua orang?

Bapak Muchdy menjawab laporan keuangan kami publikasikan untuk semua orang sebagai bentuk keadilan yang kami lakukan. Kami publikasi juga dimedia online jadi saya rasa semua orang bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi keuangan, jadi semua berhak untuk mengetahui berapa pendapatan dan belanja parepare. Selain itu, dalam pencatatan juga kita melakukan dengan jujur sesuai dengan fakta dan bukti transaksi yang ada.

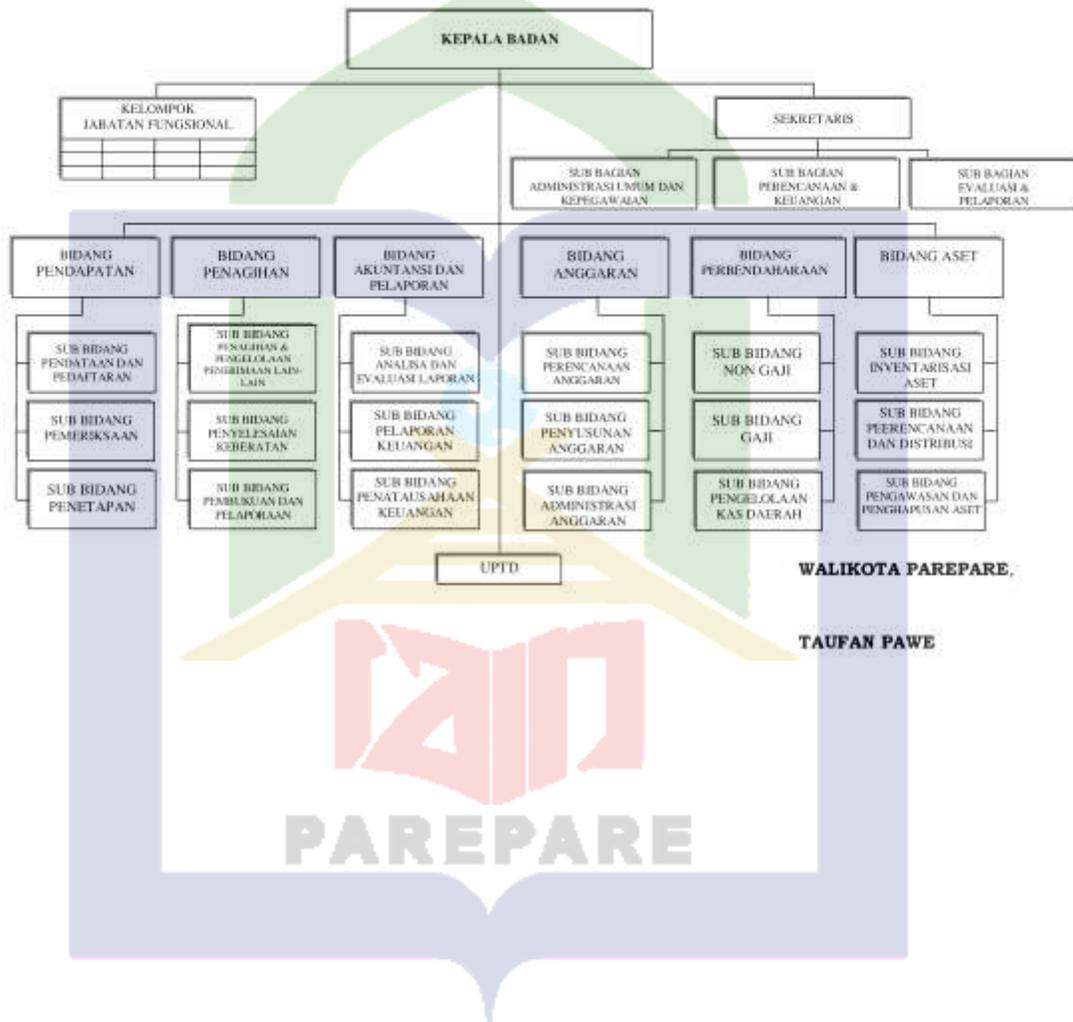
b) Bagaimana BKD dalam menerapkan keadilan terhadap akuntabilitas, transparansi dan kinerja?

Bapak Muchdy menjawab kita sesuaikan saja semua dengan aturan yang berlaku seperti apakah APBDnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh keluar dari yang sudah disahkan di DPR, karena hal itu juga sudah disesuaikan dengan asumsi keadilan untuk semua masyarakat.



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH**



REKAPITULASI POKOK UTAMA DI DAERAH  
REALISASI ANGGARAN

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Anggaran Setelah Perubahan 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
<b>PENDAPATAN - LRA</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.a	20,810,000,000.00	27,858,992,427.00	135.16%	22,509,017,426.00
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.b	7,162,925,200.00	7,504,251,531.00	104.77%	8,510,279,951.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.c	6,146,087,772.00	6,146,087,772.87	100.00%	5,322,500,821.00
Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.d	107,071,160,520.00	99,114,332,857.61	92.57%	99,971,454,016.73
<b>JUMLAH I</b>		<b>140,990,173,492.00</b>	<b>140,621,664,388.48</b>	<b>99.74%</b>	<b>138,313,272,054.73</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA</b>					
<b>PERUBAHAN - LRA</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.a.1)	23,699,499,397.00	15,586,162,143.00	65.77%	17,612,432,750.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.5.1.2.a.2)	3,858,093,644.00	3,520,727,381.00	60.10%	7,427,912,161.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	7.5.1.2.a.3)	454,752,410,000.00	454,752,410,000.00	100.00%	462,883,790,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	7.5.1.2.a.4)	218,687,693,000.00	201,051,860,322.00	91.94%	242,197,838,000.00
<b>JUMLAH II</b>		<b>702,997,696,041.00</b>	<b>674,911,149,746.00</b>	<b>96.00%</b>	<b>730,121,077,911.00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA</b>					
Dana Penyesuaian	7.5.1.2.b	144,411,843,806.90	7,500,000,000.00	5.19%	0.00
<b>JUMLAH III</b>		<b>144,411,843,806.90</b>	<b>7,500,000,000.00</b>	<b>5.19%</b>	<b>0.00</b>
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.c	49,327,673,040.00	43,603,884,454.00	88.40%	41,003,902,758.47
<b>JUMLAH IV</b>		<b>49,327,673,040.00</b>	<b>43,603,884,454.00</b>	<b>88.40%</b>	<b>41,003,902,758.47</b>
<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	7.5.1.2.d	2,665,387,200.00	7,439,598,400.00	279.12%	6,010,607,507.00
<b>JUMLAH V</b>		<b>2,665,387,200.00</b>	<b>7,439,598,400.00</b>	<b>279.12%</b>	<b>6,010,607,507.00</b>
<b>JUMLAH VI (I+II+III+IV+V)</b>		<b>899,402,550,287.90</b>	<b>733,456,642,000.00</b>	<b>81.55%</b>	<b>777,135,583,176.47</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>					
Pendapatan Hibah	7.5.1.3	23,191,000,000.00	0.00	0.00%	4,477,097,912.00
Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.5.1.3.a	0.00	18,182,433,544.00	100.00%	0.00
<b>JUMLAH VII</b>		<b>23,191,000,000.00</b>	<b>18,182,433,544.00</b>	<b>78.40%</b>	<b>4,477,097,912.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN (I+VI+VII)</b>		<b>1,863,563,723,579.90</b>	<b>892,260,740,552.48</b>	<b>47.88%</b>	<b>917,925,913,143.20</b>
<b>PEMBAYARAN OPERASI</b>					
Gaji Pegawai	7.5.1.4	328,103,137,131.00	300,910,954,568.00	91.71%	361,064,987,886.00
Gaji Barang dan Jasa	7.5.1.4.a	347,558,175,522.00	323,521,065,651.70	93.08%	290,202,115,001.00

Variasi	Kode	Anggaran Setelah Perubahan 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Bunga	7.5.1.4.c	4.500.000.000,00	2.173.522.177,61	48,32%	2.200.000.000,00
Belanja Subsidi	7.5.1.4.d	7.900.470.000,00	1.767.677.040,00	22,37%	1.174.700.000,00
Belanja Hibah	7.5.1.4.e	46.770.564.000,00	32.338.830.640,00	69,17%	4.870.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>729.820.297.653,00</b>	<b>660.272.434.451,31</b>	<b>90,47%</b>	<b>660.286.007.000,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.5.1.5</b>				
Belanja Modal Tanah	7.5.1.5.a	32.581.000.000,00	3.223.721.807,00	9,90%	8.342.875.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.5.b	158.856.957.000,00	101.901.412.191,00	64,19%	97.188.649.808,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.5.c	83.883.945.630,00	59.036.372.325,00	70,39%	70.858.190.184,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.5.d	171.746.399.555,00	143.918.171.165,00	83,80%	149.826.282.120,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.5.e	164.960.000,00	153.384.280,00	92,94%	796.216.000,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>407.628.202.475,00</b>	<b>308.241.662.068,00</b>	<b>75,66%</b>	<b>324.802.373.372,47</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>7.5.1.6</b>				
Belanja Tak Terduga		2.000.000.000,00	556.823.280,00	27,84%	381.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>556.823.280,00</b>	<b>27,84%</b>	<b>381.000.000,00</b>
<b>TRANSFER</b>	<b>7.5.1.7</b>				
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (transfer bantuan keuangan Lainnya - Penerima Hibah)		805.904.050,00	805.904.050,00	100,00%	805.904.050,00
<b>JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>805.904.050,00</b>	<b>805.904.050,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>805.904.050,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.135.258.905.954,00</b>	<b>969.898.823.855,31</b>	<b>85,47%</b>	<b>996.775.184.897,85</b>
<b>PLUS/DEFISI (Jumlah Pendapatan - Jumlah Pengeluaran)</b>		<b>(71.675.180.454,10)</b>	<b>(77.590.083.302,83)</b>	<b>108,26%</b>	<b>(63.849.271.754,65)</b>
<b>BEBAYAAN</b>	<b>7.5.1.8</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.1.8.a</b>				
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	7.5.1.8.a.1)	81.130.255.404,10	81.130.255.404,10	100,00%	162.242.482.101,49
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00		0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00		0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>81.130.255.404,10</b>	<b>81.130.255.404,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.242.482.101,49</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.1.8.b</b>				
Pemertan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.8.b.1)	5.750.000.000,00	0,00	0,00%	9.877.097.012,90
Perbaikan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.5.1.8.b.2)	3.725.075.000,00	2.365.857.030,74	63,51%	2.563.831.030,74
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>9.475.075.000,00</b>	<b>2.365.857.030,74</b>	<b>24,97%</b>	<b>12.242.954.942,74</b>
<b>PEMBIAYAAN BERSIH</b>		<b>71.675.180.404,10</b>	<b>78.384.398.373,36</b>	<b>109,36%</b>	<b>149.999.527.138,75</b>
<b>64.1.2.B.III PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>7.5.1.9</b>	<b>0,00</b>	<b>786.315.070,53</b>		<b>81.150.255.404,10</b>

64.1.2.B.III Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.



Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2017  
(dalam ribuan Rupiah)

No	Uraian	Keff	Anggaran Setelah Perubahan 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2017
1	<b>PENDAPATAN - LRA</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	7.5.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.a	27.500.000.000,00	18.248.094.083,75	103,36%	27.858.952.427,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.b	6.975.105.000,00	7.027.235.207,00	109,33%	7.504.251.131,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.c	6.473.337.384,00	6.473.337.204,00	100,00%	6.146.037.777,87
6	Lain-lain PAD Yang Sah	7.5.1.d	100.845.566.529,00	99.893.818.135,01	91,81%	99.114.330.807,81
7	<b>JUMLAH I</b>		<b>131.694.948.814,00</b>	<b>124.743.343.709,76</b>	<b>89,07%</b>	<b>140.622.664.389,48</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	7.5.1.2				
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH RUSAK - DANA PERMBAHANGUN - LRA</b>	7.5.1.2.a				
10	Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.a.1	16.741.323.000,00	11.937.116.620,00	77,58%	15.086.162.143,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.5.1.2.a.2	478.731.000,00	434.679.247,00	91,44%	3.530.727.381,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.5.1.2.a.3	454.752.410.000,00	454.752.410.000,00	100,00%	454.752.410.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	7.5.1.2.a.4	182.727.708.800,00	127.529.669.483,00	96,98%	150.663.311.010,00
14	<b>JUMLAH II</b>		<b>608.860.172.100,00</b>	<b>599.611.995.270,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>674.511.159.746,00</b>
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH RUSAK - LAINNYA - LRA</b>	7.5.1.2.b				
16	Dana Penyesuaian		25.250.000.000,00	25.250.000.000,00	100,00%	7.500.000.000,00
17	<b>JUMLAH III</b>		<b>25.250.000.000,00</b>	<b>25.250.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
18	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	7.5.1.2.c				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		86.306.445.202,47	38.291.236.442,00	88,01%	43.625.884.454,00
20	<b>JUMLAH IV</b>		<b>86.306.445.202,47</b>	<b>38.291.236.442,00</b>	<b>88,01%</b>	<b>43.625.884.454,00</b>
21	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	7.5.1.2.d				
22	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya		7.000.000.000,00	7.204.973.721,00	133,64%	7.439.570.400,00
23	<b>JUMLAH V</b>		<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.204.973.721,00</b>	<b>103,64%</b>	<b>7.439.570.400,00</b>
24	<b>JUMLAH VI (II+III+IV+V)</b>		<b>697.516.617.292,47</b>	<b>670.548.998.433,00</b>	<b>96,13%</b>	<b>733.456.642.606,00</b>
25	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	7.5.1.3				
26	Pendapatan Hibah	7.5.1.3.a	21.191.000.000,00	19.076.931.979,00	82,16%	18.182.433.564,00
27	Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.5.1.3.b	19.091.000.000,00	17.091.071.979,00	84,57%	18.182.433.564,00
28	<b>JUMLAH VII</b>		<b>23.191.000.000,00</b>	<b>19.076.931.979,00</b>	<b>82,16%</b>	<b>18.182.433.564,00</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN (I+VI+VII)</b>		<b>671.842.556.096,47</b>	<b>623.920.414.121,76</b>	<b>94,54%</b>	<b>672.260.748.952,48</b>
30	<b>BELANJA</b>					
31	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.1.4				
32	Belanja Pegawai	7.5.1.4.a	314.201.434.827,00	301.185.840.878,00	95,86%	260.910.254.068,00
33	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.4.b	158.773.846.877,00	399.261.761.165,00	83,66%	323.521.083.651,70
34	Belanja Bangun	7.5.1.4.c	2.175.000.000,00	1.094.093.598,82	91,72%	2.574.522.175,61
35	Belanja Subsidi	7.5.1.4.d	2.935.400.000,00	2.234.500.000,00	76,54%	1.237.972.000,00
36	Belanja Hibah	7.5.1.4.e	30.156.000.000,00	65.389.213.800,40	150,51%	32.158.819.636,00
37	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>708.228.331.504,00</b>	<b>660.819.214.832,22</b>	<b>93,06%</b>	<b>662.252.074.431,81</b>
38	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.1.5				
39	Belanja Modal Tanah	7.5.1.5.a	18.351.960.000,00	7.486.941.865,00	71,59%	3.225.721.807,00

No	Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
49	Belanja Modal Perabotan dan Mesin	7.5.1.5.b	57.365.188.073,00	50.276.361.398,00	87,64%	101.964.412.491,00
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.5.c	46.218.679.607,00	34.816.708.352,00	75,30%	19.036.372.315,00
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.5.d	33.984.454.062,00	32.771.671.070,00	96,43%	142.928.173.100,00
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.5.e	4.258.473.171,00	3.836.565.280,00	90,32%	158.064.206,00
53	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>141.826.804.913,00</b>	<b>121.699.306.099,00</b>	<b>85,83%</b>	<b>321.141.662.008,00</b>
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>7.5.1.6</b>				
55	Belanja Tak Terduga		2.000.000.000,00	205.868.000,00	10,29%	556.823.380,00
56	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>205.868.000,00</b>	<b>10,29%</b>	<b>556.823.380,00</b>
57	<b>TRANSFER</b>	<b>7.5.1.7</b>				
58	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
59	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik		805.904.056,00	805.904.056,00	100,00%	805.904.056,00
60	<b>JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>805.904.056,00</b>	<b>805.904.056,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>805.904.056,00</b>
61	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>144.633.610.979,00</b>	<b>122.509.178.155,00</b>	<b>84,76%</b>	<b>407.652.541.444,00</b>
62	<b>SURPLUS/DEFISIT (Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja)</b>		<b>7.229.684.929,47</b>	<b>33.700.070.268,54</b>	<b>466,13%</b>	<b>(77.598.083.302,83)</b>
63	<b>PEMBAYARAN</b>	<b>7.5.1.8</b>				
64	<b>PENERIMAAN PEMBAYARAN</b>	<b>7.5.1.8.a</b>				
65	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	7.5.1.8.a.1	786.315.070,53	786.315.070,53	100,00%	81.150.255.404,10
66	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN</b>		<b>786.315.070,53</b>	<b>786.315.070,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.150.255.404,10</b>
67	<b>PENGELUARAN PEMBAYARAN</b>	<b>7.5.1.8.b</b>				
68	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.8.b.1	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00%	6,00
69	Penyerahan Pinjaman Pemerintah Dalam Negeri	7.5.1.8.b.2	2.760.000.000,00	2.765.857.030,74	99,99%	2.765.857.030,74
70	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBAYARAN</b>		<b>8.010.000.000,00</b>	<b>8.015.857.030,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.765.857.030,74</b>
71	<b>PEMBAYARAN BERSIH</b>		<b>(7.229.684.929,47)</b>	<b>(7.229.541.000,21)</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.384.398.373,36</b>
72	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI</b>		<b>0,00</b>	<b>26.470.528.308,33</b>		<b>786.315.070,53</b>
73	<b>KOREKSI SILPA</b>			<b>3.628.192.331,00</b>		
74	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>7.5.1.9</b>		<b>22.848.336.077,33</b>		

Salah satu Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Parepare, 16 Mei 2019

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
WALIKOTA PAREPARE

Taufan Pawe

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	<b>PENDAPATAN - LRA</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	7.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.a	31.975.000.000,00	33.925.012.865,90	105,09%	30.348.994.083,75
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.b	7.089.669.100,00	7.491.169.079,00	94,36%	7.827.236.257,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.c	6.935.032.137,00	6.935.032.137,00	100,00%	6.471.337.104,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.d	110.183.770.571,00	89.544.913.276,80	81,27%	89.093.836.135,01
7	<b>JUMLAH I</b>		<b>156.982.471.858,00</b>	<b>137.892.127.358,78</b>	<b>87,84%</b>	<b>134.343.363.709,76</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	7.5.1.2				
9	<b>TRANSFER PERHIMPATAN PUSAT - DANA PERMBAUNGAN - LRA</b>	7.5.1.2.a				
10	Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.a.1	12.801.236.000,00	9.280.471.710,00	72,50%	12.987.316.820,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.5.1.2.a.2	7.318.451.000,00	4.632.771.530,00	63,03%	4.342.679.247,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.5.1.2.a.3	474.933.198.000,00	474.933.198.000,00	100,00%	454.752.410.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	7.5.1.2.a.4	185.342.824.000,00	156.841.688.487,00	84,68%	127.528.000.000,00
14	<b>JUMLAH II</b>		<b>680.446.809.000,00</b>	<b>645.718.136.327,00</b>	<b>97,77%</b>	<b>599.611.605.270,00</b>
15	<b>TRANSFER PERHIMPATAN PUSAT - LAINNYA - LRA</b>	7.5.1.2.b				
16	Dana Penyesuaian		28.982.849.000,00	28.982.849.000,00	100,00%	25.250.000.000,00
17	<b>JUMLAH III</b>		<b>28.982.849.000,00</b>	<b>28.982.849.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.250.000.000,00</b>
18	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	7.5.1.2.c				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		61.644.855.757,67	53.816.252.522,49	85,68%	38.291.216.442,00
20	<b>JUMLAH IV</b>		<b>61.644.855.757,67</b>	<b>53.816.252.522,49</b>	<b>85,68%</b>	<b>38.291.216.442,00</b>
21	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	7.5.1.2.d				
22	Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Lainnya		82.881.150.000,00	81.566.407.384,00	98,41%	7.394.876.721,00
23	<b>JUMLAH V</b>		<b>82.881.150.000,00</b>	<b>81.566.407.384,00</b>	<b>98,41%</b>	<b>7.394.876.721,00</b>
24	<b>JUMLAH VI (I+II+III+IV+V)</b>		<b>833.955.663.757,67</b>	<b>800.082.645.233,49</b>	<b>97,02%</b>	<b>670.346.098.433,00</b>
25	<b>LAIN-LAIN PENGANTARAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	7.5.1.3				
26	Pendapatan Hibah	7.5.1.3.a	4.125.359.000,00	1.161.000.000,00	28,19%	1.344.000.000,00
27	Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.5.1.3.b	19.991.000.000,00	18.310.180.000,00	91,59%	17.694.931.976,00
28	<b>JUMLAH VII</b>		<b>24.116.359.000,00</b>	<b>19.471.180.000,00</b>	<b>80,74%</b>	<b>19.038.931.976,00</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN (I+VI+VII)</b>		<b>1.015.054.494.615,67</b>	<b>966.446.932.592,27</b>	<b>95,21%</b>	<b>823.630.414.121,76</b>
30	<b>BELANJA</b>					
31	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.1.4				
32	Belanja Pegawai	7.5.1.4.a	336.627.913.364,00	317.193.907.930,00	94,23%	301.139.869.058,00
33	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.4.b	387.156.060.378,00	324.451.157.204,44	83,80%	309.261.761.164,00
34	Belanja Bunga	7.5.1.4.c	2.500.000.000,00	1.952.594.033,69	78,10%	1.994.830.968,02
35	Belanja Subsidi	7.5.1.4.d	-	-	0,00%	2.234.500.000,00
36	Belanja Hibah	7.5.1.4.e	14.984.200.000,00	32.896.940.878,50	218,96%	45.859.211.000,40
37	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.4.f	3.102.500.000,00	2.527.500.000,00	81,47%	-
38	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>744.370.673.742,00</b>	<b>678.934.100.046,03</b>	<b>91,21%</b>	<b>660.040.241.831,22</b>
39	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.1.5				
40	Belanja Modal Tanah	7.5.1.5.a	12.350.000.000,00	7.236.762.946,00	58,60%	7.496.941.365,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.5.b	92.154.422.122,00	80.337.277.221,30	87,18%	90.276.361.195,00
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.5.c	130.801.613.342,00	116.453.841.777,00	89,03%	14.818.796.353,00
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	7.5.1.5.d	44.135.964.830,00	35.109.594.181,00	79,55%	32.771.671.070,00
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.5.e	4.244.189.996,00	4.344.167.375,00	102,35%	3.816.585.388,00
45	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>283.686.190.290,00</b>	<b>243.462.043.500,30</b>	<b>85,87%</b>	<b>129.176.127.986,00</b>

No	Uraian	Reff	Anggaran Setelah Perubahan 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
54						
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.6				
56	Belanja Tak Terduga		1.000.000.000,00	77.500.000,00	7,75%	205.968.000,00
57	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		1.000.000.000,00	77.500.000,00	7,75%	205.968.000,00
58						
59	TRANSFER	7.5.1.7				
60	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
61	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik		822.966.661,00	822.636.802,00	99,96%	805.904.056,00
62	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		822.966.661,00	822.636.802,00	99,96%	805.904.056,00
64	JUMLAH BELANJA		1.029.879.830.693,00	923.316.280.348,33	89,65%	790.230.343.853,22
66	SURPLUS/DEFISIT (Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja)		(14.825.336.077,33)	43.130.652.243,94	(290,93)	33.700.070.268,54
67						
68	PEMBIAYAAN	7.5.1.8				
69	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.8.a				
70	Penerimaan SILPA tahun sebelumnya	7.5.1.8.a.1)	22.841.336.077,33	22.841.336.077,33	100,00%	786.315.070,53
71	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		22.841.336.077,33	22.841.336.077,33	100,00%	786.315.070,53
72						
73	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.8.b				
74	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.8.b.1)	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00%	5.250.000.000,00
75	Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri	7.5.1.8.b.2)	2.766.000.000,00	2.765.857.030,74	99,99%	2.765.857.030,74
76	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		8.016.000.000,00	8.015.857.030,74	100,00%	8.015.857.030,74
77						
78	PEMBIAYAAN BERSIH		14.825.336.077,33	14.825.479.046,59	100,00%	(7.229.541.960,21)
79	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI			57.956.131.290,53		26.470.528.108,33
80	KOREKSI SILPA			-		3.629.102.331,00
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.9		57.956.131.290,53		22.841.336.077,33

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan



28 Mei 2020  
 WALIKOTA PAREPARE  
 PEMERINTAN KOTA PAREPARE  
 WALIKOTA PAREPARE  
 TAUFAN PAWE

Scanned by TapScanner



## WALIKOTA PAREPARE

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari :  
(a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional;  
(d) Laporan Perubahan SAL; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan  
Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019  
sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem  
Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi  
pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas  
Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi  
Pemerintahan.

PAREPARE

Parepare, Mei 2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1829/In.39.8/PP.00.9/6/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURFADILAH SINDIKA SARI  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 14 MEI 1999  
NIM : 17.2800.052  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : JL. SAMPARAJA, KELURAHAN UJUNG BULU,  
KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**AKUNTABILITAS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PAREPARE  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

08 Juni 2021  
Dekan,



*amil*

Muhammad Kamal Zubair

SRN IP0000375



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 377/IP/DPM-PTSP/6/2021**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA NAMA UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK	<p>: <b>NURFADILAH SINDIKA SARI</b>                  : <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>                  : <b>AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / EKONOMI DAN BISNIS</b>                  : <b>JL. SAMPARAJA</b>                  : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :                  JUDUL PENELITIAN : <b>AKUNTABILITAS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PAREPARE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH</b></p>
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKASI PENELITIAN : **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **14 Juni 2021 s.d 14 Juli 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **15 Juni 2021**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**  
 Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**  
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSiE**  
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdapat di database DPPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122

Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id) / [www.dipendaparepare.net](http://www.dipendaparepare.net)

Email : [badankeuangandaerah@pareparekota.go.id](mailto:badankeuangandaerah@pareparekota.go.id)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 895/567/ BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSSALIM, S.IP., M.Si.

Nip : 19700816 199203 1 007

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : NURFADILAH SINDIKA SARI

NIM : 17.2800.052

Jurusan/Fakultas : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Samparaja

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 14 Juni 2021 s.d 14 Juli 2021. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan judul "AKUNTABILITAS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PAREPARE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Agustus 2021

AGUS SALIM, S.IP., M.Si.  
Pembina (IV/a)



AGUSSALIM, S.IP., M.Si.

Pembina (IV/a)

Nip. 19700816 199203 1 007

Scanned by TapScanner

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pak Muchdy



Wawancara dengan Ibu Indra Karyana



Wawancara dengan Pak Agussalim



Wawancara dengan Ibu Andi Darawati



## BIODATA PENULIS



Nurfadilah Sindika Sari lahir pada tanggal 14 Mei 1999, di Parepare. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, Adik Nurfahirah Syariel. Anak dari Syahriel dan Mutmainnah yang berdomisili di Parepare tepatnya di Kelurahan Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare. Peneliti memulai pendidikan di SDN 08 Parepare dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 10 Parepare dan selesai pada tahun 2014, di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama Peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Parepare yaitu pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Peneliti pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekretariat Daerah Kota (SETDAKO) Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Peneliti melakukan penelitian di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan judul “Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Parepare Berdasarkan Prinsip Syariah.”